

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan Telepon : 0711 - 891216 Faksimile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753 E-mail : dpmptsp@banyuasinkab.go.id Website; www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERORANGAN (PO)

BERDASARKAN

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

 NOMOR TDP
 BERLAKU S/D TANGGAL
 PENDAFTARAN : BARU

 06.14.5.85.00095
 23 MEI 2023
 PEMBAHARUAN :

NAMA PERUSAHAAN:

STATUS:

YAYASAN PENDIDIKAN. AL-MUHIBBIN

KANTOR TUNGGAL

PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS: RATNO MAHDI HARRIS, M.PD

ALAMAT PERUSAHAAN: JL. PALEMBANG-BETUNG KM. 65 KOMPLEK GRIYA MULYART. 06 RW. 02 LK. I

DESA/KEL. RIMBA ASAM KEC. BETUNG

KAB. BANYUASIN

NPWP: 02.797.357.7-306.000

NOMOR TELEPON:

FAX:

KEGIATAN USAHA POKOK:

KBLI:

PENDIDIKAN, SEKOLAH/MADRASAH SWASTA

85121

Dikeluarkan di

: PANGKALAN BALAI

Pada Tanggal

DPM -

: 23 MEI 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABURATEN BANYUASIN

Ir. H.BABUL IBRAHIM
U PÉMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630601 198903 1 007

DPM - PTSP

PERHATIAN

- 1. Tanda Daftar Perusahaan sebagai syarat pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBN-RI).
- 2. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.
- 3. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
- 4. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bùlan setelah kehilangan atau rusak.
- 5. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan baik yang harus mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman atau dilaporkan kepada Menteri Kehakiman, wajib didaftarkan dan dilaporkan ke kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.
- 6. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluwarsa;
 - c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- 7. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.